



KEPANITERAAN DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI

## LAPORAN KEGIATAN

PENDIDIKAN PENINGKATAN PEMAHAMAN  
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI FORUM KOMUNIKASI MGMP PPKN

SMA PROVINSI JAWA BARAT

Bogor, 26 s.d. 28 Februari 2020

|

|

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN .....	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum .....	1
A.2. Tujuan .....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN .....	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat.....	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Akomodasi Peserta .....	4
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat .....	4
B.6. Uraian Kegiatan .....	5
B.6.1. Pendaftaran Peserta .....	5
B.6.2. Acara Pembukaan .....	6
B.6.3. Penjelasan Teknis .....	6
B.6.4. Penyampaian Materi .....	7
B.6.5. Acara Penutupan .....	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN .....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> .....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner .....	11
D. HAMBATAN.....	13
E. PEMBIAYAAN .....	14
F. PENUTUP.....	14
G. LAMPIRAN .....	15

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Surat Keputusan Kegiatan**
- 4. Jadwal Kegiatan**
- 5. Rekap Hasil Pre dan Post Test**
- 6. Rekap Lembar Observasi**
- 7. Rekap Kuesioner Evaluasi**
- 8. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
- 9. Surat Undangan/Surat Dinas**
- 10. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 11. SPK Kegiatan**
- 12. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan**
- 13. Bahan Presentasi**
- 14. Daftar Nama Peserta**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum**  
**Komunikasi MGMP PPKN SMA Provinsi Jawa Barat**

**Bogor, Rabu s.d. Jum'at, 26 s.d. 28 Februari 2020**

**A. PENDAHULUAN**

**A.1. Umum**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) penghianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;

2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada

dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN SMA Provinsi Jawa Barat** dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, Hak Konstitusional Warga Negara, Konstitusi dan Konstitusionalisme, hingga Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi peserta pendidikan.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan peserta pendidikan.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN SMA Provinsi Jawa Barat”.

### B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Februari 2020 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan

Peserta terdiri dari 125 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota MGMP PPKN SMA Jawa Barat. Peserta hanya dibatasi dari Jawa Barat mengingat minimnya anggaran penyelenggaraan kegiatan yang dimiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sehingga masing-masing peserta diharuskan menanggung biaya transportasi masing-masing. Selain itu peserta juga tidak menerima uang saku maupun penggantian transportasi.

### B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib menginap di Mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang yang setiap hari dibersihkan dan dirapikan.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi: Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut, serta sandal kamar) dan keperluan sehari-hari (gula, kopi, teh, dan air mineral).

### B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi :
  - 1) Tas;
  - 2) Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi;
  - 3) Block Note dan Pulpen;

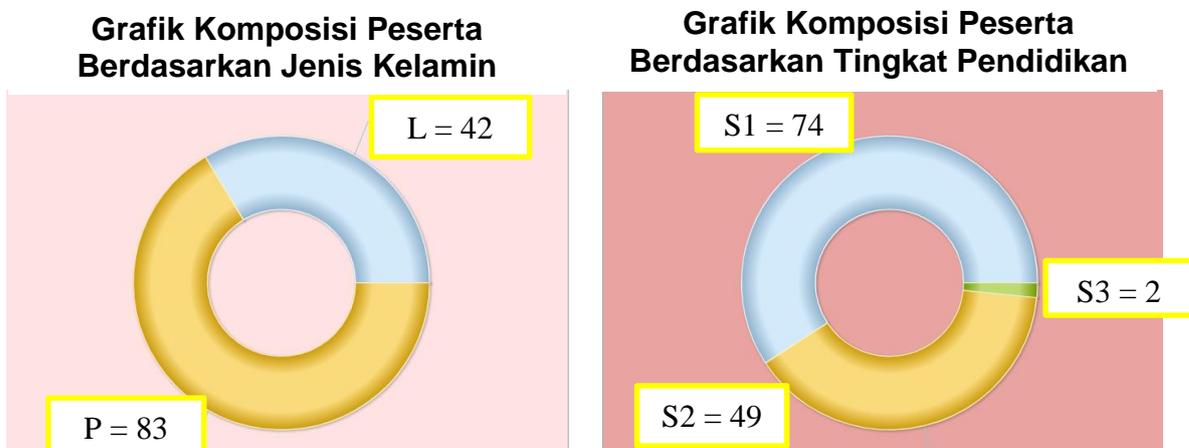
- 4) Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*soft file*);
  - 5) Kaos Olahraga;
  - 6) Botol Air Minum.
- b. Sertifikat
- 1) Peserta diberikan Sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pin Alumni Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
  - 2) Sertifikat dan Pin Alumni hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

## B.6. Uraian Kegiatan

### B.6.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Rabu, 26 Februari 2020 pukul 10.00 WIB – 15.30 WIB. Kegiatan registrasi menggunakan aplikasi E-Pusdik sehingga pengumpulan data peserta, pembagian kamar, materi dan jadwal kegiatan tanpa penggunaan kertas. Selain itu data peserta juga otomatis terekam kedalam database E-Pusdik sehingga memudahkan perekaman daftar hadir peserta dengan *barcode*.

Dari total 150 daftar nama calon peserta yang telah disampaikan panitia Forum Komunikasi MGMP PPKN SMA Provinsi Jawa Barat, 125 peserta hadir dan melakukan registrasi ulang, sementara 25 peserta lainnya tidak dapat hadir. Berikut adalah komposisi peserta yang hadir:



### **B.6.2. Acara Pembukaan**

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. didampingi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono, S.E., M.M. pada Rabu, 26 Februari 2020 pukul 19.00 WIB.

### **B.6.3. Penjelasan Teknis**

Penjelasan Teknis disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan. Pada penjelasan teknis ini, berikut beberapa hal penting yang disampaikan:

1. Penjelasan tentang Pusat Pancasila dan Konstitusi sebagai Zona integritas yang mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM).
2. Penyampaian Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi.
3. Penegasan Pakta Integritas, antara lain:
  - a. Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**
    - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
    - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, seminar kit, dan narasumber.
    - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
  - b. Peserta:**
    - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
    - ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
    - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
  - c. Narasumber:**
    - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
    - ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
    - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku

4. Penyampaian informasi terkait Unit Pengendalian Gratifikasi Mahkamah Konstitusi, *whistle blowing system* yang ada di laman <https://wbs.mkri.id/> dan fasilitas <https://lapor.go.id/>.
5. Penyampaian informasi tentang saluran pengaduan atau aspirasi peserta melalui Pohon Saran, Kotak Saran, dan Kuesioner Online yang telah disediakan.
6. Penyampaian informasi Mitigasi Bencana selama kegiatan diselenggarakan.
7. Penjelasan terkait fasilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terutama fasilitas khusus difabel (parkir, elevator, kamar, dan akses jalur khusus difabel)
8. Penyampaian komitmen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan upaya mengurangi penggunaan kertas melalui registrasi online, penyebaran materi, kuesioner, *pre* dan *post test* melalui aplikasi E-Pusdik yang dapat diakses melalui barcode yang ada di nametag masing-masing peserta.
9. Penjelasan singkat tentang Ketentuan Umum Kegiatan, Kurikulum dan Jadwal Kegiatan.
10. Penyampaian informasi tentang peniadaan penggunaan air minum kemasan plastik sehingga masing-masing peserta diberi botol minuman yang bisa diisi ulang di titik dispenser yang telah disiapkan panitia.

#### B.6.4. Penyampaian Materi

##### 1) Materi dan Narasumber

Berikut adalah ringkasan materi dan narasumber kegiatan:

NO.	RINGKASAN MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b> a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila	Yudi Latief, Ph.D

NO.	RINGKASAN MATERI	NARASUMBER
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa</li> <li>c. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Ideologi Nasional</li> <li>d. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Dasar negara.</li> <li>e. Tantangan reaktualisasi implementasi Pancasila di era globalisasi</li> </ul>	
2.	<p><b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep dan prinsip-prinsip HAM</li> <li>b. Perkembangan HAM dan sebagai tata nilai pergaulan masyarakat internasional</li> <li>c. Jaminan dan pengaturan HAM dalam UUD Tahun 1945</li> <li>d. Kewajiban dan tanggung jawab Negara terhadap HAM</li> <li>e. Terminologi dan Klasifikasi pelanggaran HAM</li> </ul>	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H.
3.	<p><b>Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945</li> <li>b. Dasar-dasar Penyelenggaran Negara</li> <li>c. Sistem Pemerintahan</li> <li>d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>)</li> <li>e. Otonomi Daerah</li> </ul>	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.
4.	<p><b>Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme</li> <li>b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional</li> <li>c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Konstitusi</li> </ul>	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,M.H.

NO.	RINGKASAN MATERI	NARASUMBER
	d. Perubahan Konstitusi	
5.	<p><b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (PUU) Tahun 2020</b></p> <p>a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi</p> <p>b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi</p> <p>c. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</p> <p>d. Putusan MK terkait Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara</p>	<p><b>Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</b> Prof. Dr. M. Guntur Hamzah</p>
6.	<p><b>Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang</b></p> <p>a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon</p> <p>b. Identitas Lengkap Pemohon</p> <p>c. Uraian yang Jelas Mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kewenangan Mahkamah</li> <li>2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon</li> <li>3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li> <li>4) Pokok Permohonan Pemohon</li> <li>5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon</li> </ol> <p>d. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> A.Edi Subiyanto</li> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> Dian Chusnul Chatimah</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Abdul Ghoffar</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Alia Harumdani</li> </ul>
7.	<p><b>Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap peserta secara individu ataupun berkelompok melakukan praktik penyusunan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> Ery Satria P</li> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> Ria Indriyani</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Ananthia Ayu</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Andriani WN</li> </ul>

NO.	RINGKASAN MATERI	NARASUMBER
8.	<p><b>Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap peserta secara individu ataupun berkelompok melakukan presentasi Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang untuk didiskusikan dengan sesama peserta dan narasumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Panitera Pengganti MK</b> Saiful Anwar</li> <li><b>Panitera Pengganti MK</b> Syukri Asy'ari</li> <li><b>Peneliti MK</b> Rima Yuwana</li> <li><b>Peneliti MK</b> Winda Wijayanti</li> </ul>
9.	<p><b>Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara online</li> <li>Informasi Perkembangan Penanganan Perkara PUU</li> <li>Persidangan Jarak Jauh (video conference)</li> <li>Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan</li> </ol>	<p><b>IT MK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ishak Purnama</li> <li>Rudi Kurniawan</li> </ul>

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi narasumber dapat diakses peserta secara *online* di *website* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (<https://pusdik.mkri.id/>)

Selain sesi materi, peserta juga diasah kemampuan praktiknya dengan diberikan sesi khusus untuk praktik membuat draft Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Peserta diminta untuk mampu membuat draft Permohonan Pengujian Undang-Undang setelah sebelumnya diberikan materi tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang dan Teknik Penyusunan Permohonan. Selain itu peserta juga

diberi *template* permohonan sederhana sebagai panduan dalam melaksanakan praktik. Diakhir, peserta akan diajak berdiskusi dan membahas hasil praktik masing-masing sehingga hasil kerja mereka mendapat validasi dari narasumber yang mengajar.

#### **B.6.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Nanang Subekti, S.E., M.S.E. pada Jum'at, 28 Februari 2020 pukul 17.15 WIB. Setelah acara penutupan peserta diberikan Sertifikat Kelulusan dan Pin Alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. 124 peserta dinyatakan lulus sementara 1 peserta tidak lulus karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 100% kehadiran dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan.

### C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

#### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi peserta sosialisasi, penyelenggara memberikan *pre test* dan *post test* sebagai metode pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) soal. Peserta diharapkan mengerjakan soal tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dianggap benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawabannya diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 9,04 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95% pada df 110 menunjukkan nilai sebesar 1,658. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan (data terlampir). Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi peserta.

#### C.2 Hasil Evaluasi Kuesioner

Telah dilaksanakannya kegiatan ini tidak serta merta penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Komponen-komponen tersebut diukur menggunakan metode

kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta sosialisasi yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya **adalah 3,5 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. **Hasil dari evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,6 yang tergolong kategori sangat baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Perhatikan waktu sholat
  - b) Dalam penyampaian materi memperbanyak diskusi dan mengurangi ceramah
  - c) Secara berkala lakukan Sosialisasi/Diklat bagi guru PPKN SMP dan SMA
  - d) Waktu untuk tanya jawab dan praktek penyusunan permohonan kurang
  - e) Lebih banyak *ice breaking*
  - f) Waktu untuk break kurang, terutama untuk shalat Ashar
  
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  - a) Nama moderator perlu disebutkan dalam opsi pengisian kuesioner evaluasi kegiatan
  - b) Tingkatkan pelayanan yang lebih interaktif
  - c) Menu makanan perlu diperbaiki dari segi rasa, menu dan tampilan
  - d) Fasilitas air perlu ditingkatkan
  - e) Tingkatkan layanan kamar

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis – operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan relatif tidak ada hambatan yang ditemui oleh penyelenggara, namun sebagai perbaikan kedepan, perbaikan pada aspek-aspek berikut perlu lebih diperhatikan:

- a) Proses *pre-test* belum berjalan lancar karena beberapa peserta belum familiar dengan penggunaan QR Code, kedepan perlu antisipasi bagi peserta yang perangkat gadgetnya belum mendukung, untuk dilakukan pendampingan download QR-Code sebelum kegiatan *pre-test* dimulai.
- b) Menyediakan alternatif *log-in* manual dengan *username* dan *password* bagi peserta yang masih gagal log in menggunakan QR-Code, hal ini dilakukan

agar pelaksanaan *pre-test* manual dengan kertas tidak perlu lagi dilakukan.

### E. PEMBIAYAAN

Karena keterbatasan anggaran, pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme *sharing cost* yaitu:

1. MGMP PPKn SMA Provinsi Jawa Barat membiayai konsumsi, kebersihan, akomodasi, serta transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP).
2. MK membiayai penyelenggaraan kegiatan yang meliputi narasumber (akomodasi dan transportasi narasumber), serta bahan/materi kegiatan.

Anggaran MK pada kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara / Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi penyelenggara negara). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 90,794,079 (sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

### F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi  
TTd  
**Imam Margono**  
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor,           Maret 2020  
  
Ketua Panitia  
  
TTd  
**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002

## LAMPIRAN I

## A. Dokumentasi Kegiatan



Foto 1. Ketua Mahkamah Konstitusi saat pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta dari MGMP PPKn Se-Jawa Barat



Foto 2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi saat mengisi materi tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Foto 3. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,M.H. saat mengisi materi tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia



Foto 4. Bapak Yudi Latief, Ph.D berinteraksi dengan peserta saat menyampaikan materi tentang Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila



Foto 5. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. saat menyampaikan materi tentang Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI tahun 1945



Foto 6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mendengarkan pertanyaan dari salah satu peserta pendidikan



Foto 7. Ketua Mahkamah Konstitusi berfoto bersama seluruh peserta pendidikan

## Lampiran II

## Laporan Keuangan

## Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKN SMA Provinsi Jawa Barat

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Prof. Dr. Jimly Asshidique, dkk	SPD Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat	<b>Rp. 19,403,779</b>
2	Dr. Anwar Usman, dkk	Honor Narasumber dan Moderator Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat	<b>Rp. 36,100,000</b>
3	Pesona Bonsai	Mini garden Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat	<b>Rp. 3,600,000</b>
4	CV. Garnis	Konsumsi Narasumber dan Panitia Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat	<b>Rp. 20,940,000</b>
5	CV. Tri Ayu Lestari	Pengadaan tumbler Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat	<b>Rp. 2,992,000</b>
6	CV. Surya Grindulu Mandiri	Sewa Printer dan Id card	<b>Rp. 3,850,000</b>
7	Koperasi Konstitusi	Akomodasi Narasumber Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat	<b>Rp. 3,908,300</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 90,794,079</b>